

# Siti Nurbaya Minta Semua Pihak Waspada Karhutla

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta kewaspadaan semua pihak untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa iklim Indonesia bakal dipengaruhi El Nino meski lemah sampai Juni 2015, itu bisa berdampak pada rendahnya intensitas hujan dibanding tahun lalu.

Menteri Siti secara khusus juga mengingatkan pelaku usaha berbasis lahan untuk menjaga wilayah kerjanya dari kebakaran. Untuk itu setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang memadai untuk pengendalian kebakaran. Kementerian LHK juga meminta perusahaan mengidentifikasi areal yang berpotensi konflik dan terdapat aktivitas masyarakat yang bisa mengakibatkan kebakaran. "Perusahaan bisa menggandeng masyarakat dengan pola kemitraan agar kebakaran bisa dicegah. Sin-

ergikan seluruh upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," kata dia dalam siaran persnya usai rapat koordinasi dan peluncuran rencana aksi pencegahan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/2).

Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian kebakaran bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Peringatan yang disampaikan Menteri sangat penting mengingat hot spot mulai muncul. Berdasarkan pantauan satelit NOAA-18, pada periode 1 Januari-14 Februari 2015 terdapat 191 hot spot di Riau. Jumlah hot spot yang terpantau di lima provinsi prioritas pada periode yang sama sebanyak 675 hot spot.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas menyatakan kesiapan RAPP dalam membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi karhutla di Riau. "Kami sudah menyiapkan heli di pusat komando karhutla di Pangkalan

TNIAU Roesmin Nurjadin," ujar Tony.

Menurut dia, RAPP memiliki pusat komando untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang siap merespon potensi timbulnya api di seluruh HTI perusahaan dan lahan masyarakat di sekitar konsesinya. Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat dan udara, termasuk memonitor titik panas dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System) guna memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin bahaya kebakaran lahan. Perusahaan akan meningkatkan cadangan air di kanal dengan mengatur tata kelola air yang menggunakan teknologi ekohidro guna pencegahan awal. "Perusahaan juga menyiapkan helikopter dan 700 pasukan Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran termasuk 630 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA)," tambah Tony.

Tony Wenas menegaskan, sebagai perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas, kayu adalah bahan

baku yang harus dijaga agar keberlanjutan bisnis dapat dipertahankan. Perusahaan memegang teguh kebijakan pengolahan lahan tanpa bakar (*no burn policy*) sejak perusahaan beroperasi.

Berdasarkan catatan Kementerian LHK, luas lahan gambut di Riau mencapai 4,03 juta hektare (ha) atau 45% dari luas daratan Provinsi Riau 8.915.015,09 ha. Sebagai salah satu upaya penanganan kebakaran pada lahan gambut, Presiden Jokowi pada saat kunjungan ke Sei Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada 26 November 2014 telah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembuatan sekat kanal (*canal blocking*) dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan pemantuan pakar lingkungan Universitas Riau, sekat kanal yang dibuat telah memberikan dampak positif, yaitu gambut tetap basah, menyediakan air yang cukup, menghambat intrusi air laut, kadar salinitas air berkurang dan mencegah terjadinya kebakaran. (tl)